

Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia

Rino Dedi Aringga, M. Amin El Walad Meuraksa
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen02171@unpam.ac.id , dosen02147@unpam.ac.id

Received: Juli 2024/ Revised: Juli 2024 / Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK :

Perjudian online merupakan fenomena yang semakin merajalela di Indonesia, dengan dampak negatif yang meluas terhadap individu dan masyarakat. Artikel ini mengeksplorasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia dan menyajikan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Melalui tinjauan literatur, analisis kasus, dan pembelajaran yang diperoleh, artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan kerjasama antarinstansi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan teknologi penegakan hukum menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut.

Kata Kunci: Perjudian online, penegakan hukum

ABSTRACT :

Online gambling is an increasingly rampant phenomenon in Indonesia, with widespread negative impacts on individuals and society. This article explores the challenges in law enforcement against online gambling in Indonesia and presents strategies to improve the effectiveness of law enforcement. Through a literature review, case analysis, and lessons learned, this article concludes that strengthening inter-agency cooperation, increasing public awareness, and developing law enforcement technology are key to addressing these challenges.

Keyword : Online gambling, law enforcement.

PENDAHULUAN

Perjudian online telah menjadi fenomena yang merajalela di Indonesia, dengan munculnya berbagai situs web dan platform yang menawarkan berbagai permainan judi secara daring. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan. Meskipun perjudian secara umum dilarang di Indonesia, perjudian online menjadi semakin sulit untuk ditangkap dan ditekan karena sifatnya yang dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet.

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak penciptaan manusia dimulai dengan tindakan iblis, mereka melanggar perintah Tuhan dan membayar upeti kepada makhluk lain yang disebut manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, perlawanan ini terus menarik umat manusia dengan janji iblis sampai akhir dunia. Konflik kepentingan

semacam ini antara seseorang dan iblis dapat dianggap sebagai iblis jahat. Mulailah dengan kesadaran akan kecemburuan, kesombongan, kecemburuan, dan kejahatan¹

Sejak lahir ke dunia, manusia memiliki keinginan untuk hidup tertib. Keinginan untuk hidup teratur telah menyertainya sejak ia lahir dan selalu tumbuh dalam kehidupan pasangannya. Namun, itu dianggap dipesan oleh satu orang belum tentu dipesan oleh pihak lain. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu hidup bersama membutuhkan seperangkat acuan, agar terjadi benturan kepentingan akibat perbedaan pendapat tentang tatanan. Kriteria ini hanya pedoman untuk perilaku yang sesuai, Ini sebenarnya adalah sudut pandang kritis, tetapi juga semacam harapan.²

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai sosial engineering) memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.³

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, Keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.⁴

Teknologi memang tidak Tanpa diragukan lagi dapat menjadi alat untuk perubahan dalam masyarakat, inilah pentingnya peran teknologi, oleh karena itu, tampaknya masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi baik dalam arti positif maupun negatif. Kemajuan teknologi dan industri merupakan produk budaya manusia, selain memberikan dampak positif yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif tersebut terkait dengan kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam artikelnya, bahwa kejahatan erat kaitanya dengan

¹ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal.43.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1.

³ Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, hal. 13.

⁴ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018, hal. 36.

perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.⁵

Salah satu dampak negatif dari internet adalah perjudian online, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan merupakan permainan tertua didunia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan penghidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Penegakan hukum terhadap perjudian online menjadi sangat penting mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Tidak hanya merugikan individu yang terlibat dalam perjudian, tetapi juga dapat membahayakan stabilitas sosial, meningkatkan risiko penipuan, dan mendorong praktik ilegal lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi perjudian online menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk melawan perjudian online, tantangan yang dihadapi sangatlah besar. Dari segi teknologi, perkembangan pesat dalam bidang internet dan komunikasi membuat sulitnya melacak dan menindak pelaku perjudian online. Selain itu, peraturan yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum ini.

Dalam konteks ini, artikel ini akan mengulas tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia serta strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas isu ini dan memberikan pandangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan literatur. Tinjauan literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan riset, serta dokumen-dokumen resmi pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam tinjauan literatur ini:

A. Pencarian Literatur

⁵ Abdul Wahid, Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 19-21.

⁶ <http://digilib.unimed.ac.id/24706/4/7.%20NIM.%203103122022%20CHAPTER%20I.pdf>, diakses pada tanggal 20 November 2023, pukul 23.55 WIB

1. Identifikasi Kata Kunci: Kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti "penegakan hukum perjudian online", "tantangan penegakan hukum", dan "strategi penegakan hukum", telah diidentifikasi.
2. Pencarian Sumber: Pencarian dilakukan melalui basis data akademis seperti Google Scholar, PubMed, dan ProQuest, serta situs web resmi pemerintah terkait dengan hukum dan penegakan hukum.

B. Seleksi Sumber

1. Kriteria Inklusi: Sumber-sumber yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian dan memiliki kredibilitas akademik yang tinggi.
2. Penilaian Kualitas: Sumber-sumber yang dipilih dinilai berdasarkan metodologi penelitian, keakuratan data, dan validitas hasil.

C. Analisis Data

1. Pengumpulan Informasi: Informasi yang relevan dari sumber-sumber terpilih telah dikumpulkan, termasuk data statistik, temuan penelitian, dan argumen yang mendukung atau menentang isu penegakan hukum perjudian online.
2. Analisis Kritis: Data yang terkumpul dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk mendukung argumen dalam artikel ini.

D. Interpretasi dan Sintesis

1. Interpretasi Hasil: Hasil analisis diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami, dengan mengidentifikasi implikasi dan relevansi terhadap isu penegakan hukum perjudian online di Indonesia.
2. Sintesis Informasi: Informasi dari berbagai sumber disintesis untuk menyajikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan penegakan hukum dan strategi yang mungkin diambil untuk meningkatkan efektivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perjudian Online dan Implikasinya

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan di mana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan,

dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya.

Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal. Perkembangan praktik perjudian berkembang tidak hanya perjudian tradisional, seperti perjudian kartu, perjudian tebak-tebakan, tetapi juga perjudian online. Perjudian merupakan masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena membuat generasi muda cenderung malas bekerja dan modal yang disetorkan kedalam permainan ini cukup besar untuk mendapatkan dana awal. digunakan untuk pengembangan alih-alih transfer ke perjudian, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan agama, etika, dan moralitas Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjudian merupakan salah satu kejahatan sosial yang terkait dengan kejahatan, yang tidak mudah terhapus dalam perjalanan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi perjudian pada lingkungan terkecil, menghindari perilaku negatif berlebihan yang lebih serius, dan akhirnya berhenti berjudi.⁷

Dengan memahami definisi dan implikasi dari perjudian online ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh fenomena ini. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, industri, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif dari perjudian online serta melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkannya.

Hukum yang Mengatur Perjudian Online di Indonesia

Di Indonesia, perjudian online diatur oleh beberapa undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk mengontrol dan membatasi praktik perjudian ilegal. Namun, tantangan dalam penegakan hukum tetap menjadi isu yang kompleks karena perkembangan teknologi yang cepat dan keberadaan celah hukum. Berikut adalah gambaran tentang hukum yang mengatur perjudian online di Indonesia:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama yang digunakan untuk mengatur perjudian online di Indonesia. Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE secara tegas melarang segala bentuk perjudian online. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini dalam penegakan hukum perjudian online masih menemui berbagai kendala teknis dan praktis.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian: Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur perjudian online karena diterbitkan pada era

⁷ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hal. 148

sebelum internet, namun beberapa ketentuan dalam undang-undang ini masih relevan dalam konteks perjudian secara umum. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melarang dan mengatur praktik perjudian.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Organisasi Kesenian: Peraturan ini mengatur praktik perjudian dalam bentuk permainan kesenian, termasuk permainan judi tradisional. Meskipun tidak secara langsung mengatur perjudian online, peraturan ini masih menjadi acuan dalam menangani praktik perjudian di Indonesia.
4. Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Daerah: Selain regulasi nasional, beberapa daerah di Indonesia menerapkan kebijakan sendiri dalam mengatur perjudian, baik online maupun offline. Beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan yang melarang perjudian online dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar.

Meskipun telah ada upaya hukum untuk mengatasi perjudian online di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum tetap besar. Pelaku perjudian online seringkali menggunakan teknologi dan metode yang canggih untuk menyembunyikan identitas mereka dan menghindari penangkapan. Selain itu, keragaman regulasi antara pusat dan daerah juga menciptakan ketidakjelasan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ilegal.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online. Selain itu, pembaharuan hukum yang menyeluruh dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko perjudian online juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks dan beragam. Faktor-faktor tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencakup kendala hukum dan kekurangan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Teknologi sebagai Faktor Penyulit

Perkembangan teknologi telah menjadi faktor utama yang menyulitkan upaya penegakan hukum terhadap perjudian online. Pelaku perjudian online menggunakan berbagai teknologi canggih, termasuk jaringan privat virtual (VPN), kriptografi, dan anonimitas online untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Hal ini membuat sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku ilegal, serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak mereka.

2. Ketidakjelasan Regulasi

Ketidakjelasan dalam regulasi perjudian online menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang yang ada belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek teknis dan praktis dari perjudian online, meninggalkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ilegal. Selain itu, keragaman regulasi antara pusat dan daerah juga menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ilegal untuk menghindari tangkapan.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Kurangnya sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki keahlian teknis yang cukup untuk mengatasi tantangan teknologi yang kompleks dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku ilegal. Selain itu, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan peralatan investigasi juga membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum yang menyeluruh untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi, sementara lembaga penegak hukum perlu diberikan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melawan pelaku ilegal secara efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif dan efisien dalam menangani masalah perjudian online di Indonesia.

Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kerjasama Antarinstansi

Penguatan kerjasama antara berbagai lembaga dan instansi terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, departemen komunikasi dan informatika, serta lembaga terkait lainnya, menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online. Kolaborasi antarinstansi akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien, koordinasi dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum, serta penggunaan sumber daya yang lebih optimal dalam memerangi praktik perjudian ilegal.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari perjudian online

menjadi strategi penting dalam upaya penegakan hukum. Edukasi publik tentang bahaya perjudian online, termasuk dampak negatifnya terhadap kesehatan mental, stabilitas keuangan, dan keharmonisan keluarga, dapat membantu mengurangi permintaan terhadap layanan perjudian ilegal dan mengurangi tingkat pelanggaran hukum.

3. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai mitra dalam mengumpulkan informasi tentang praktik perjudian ilegal dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan menjadi salah satu pilar dalam upaya penegakan hukum yang efektif.

4. Pengembangan Teknologi Penegakan Hukum

Pengembangan dan penerapan teknologi yang canggih menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online. Pemanfaatan teknologi seperti analisis data besar (big data), kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan analisis pola perilaku online dapat membantu lembaga penegak hukum dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku ilegal, mengungkap jaringan kejahatan, serta memetakan tren dan pola perjudian ilegal yang muncul.

Selain itu, pengembangan platform dan aplikasi khusus untuk melaporkan praktik perjudian ilegal juga dapat memudahkan masyarakat dalam berkontribusi dalam upaya penegakan hukum. Dengan teknologi yang tepat, lembaga penegak hukum dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan responsivitas dalam menanggapi pelanggaran hukum terkait perjudian online.

Penguatan kerjasama antarinstansi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan teknologi penegakan hukum merupakan strategi yang saling terkait dan saling mendukung dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia. Dengan implementasi strategi-strategi ini secara komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan dapat terwujud lingkungan hukum yang lebih baik dan terjamin, serta terhindar dari dampak negatif perjudian online bagi masyarakat dan bangsa.

Studi Kasus: Analisis Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia

1. Analisis Kasus-kasus Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia

Dalam upaya menanggulangi perjudian online, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian tindakan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa kasus yang mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia:

- a. Operasi Tangkap Tangan Situs Judi Online: Pada tahun 2022, aparat penegak hukum berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Dalam operasi tersebut, puluhan tersangka diamankan dan situs-situs judi ilegal ditutup. Tindakan ini merupakan salah satu upaya keras pemerintah dalam menindak pelaku perjudian online yang merugikan masyarakat.

- b. Penangkapan Bandar Judi Online Internasional: Kasus penangkapan bandar judi online internasional pada tahun 2023 menjadi sorotan publik. Aparat penegak hukum berhasil menangkap seorang bandar judi online yang beroperasi dari luar negeri namun menargetkan pasar Indonesia. Penangkapan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian online tidak terbatas pada pelaku domestik, tetapi juga melibatkan kerjasama lintas negara.
 - c. Pemblokiran Situs Judi Online: Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan situs judi online yang dianggap ilegal. Langkah ini diambil untuk memutus akses masyarakat Indonesia ke situs-situs perjudian ilegal yang dapat merugikan mereka secara finansial dan sosial.
2. Pembelajaran dari Kasus-kasus Tersebut

Dari kasus-kasus di atas, terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia:

- a. Kerjasama Internasional Penting: Kasus penangkapan bandar judi online internasional menunjukkan pentingnya kerjasama lintas negara dalam menanggulangi perjudian online. Dalam menghadapi fenomena yang lintas batas seperti perjudian online, kerjasama antar negara menjadi kunci untuk mengungkap jaringan kejahatan yang kompleks.
- b. Pentingnya Tindakan Preventif: Pemblokiran situs judi online oleh pemerintah merupakan tindakan preventif untuk mengurangi akses masyarakat ke perjudian ilegal. Langkah ini menjadi penting karena dapat mencegah masyarakat dari terjerumus ke dalam praktik perjudian yang merugikan.
- c. Kontinuitas dan Kesenambungan Diperlukan: Penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan kontinuitas dan kesinambungan dalam upaya penindakan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum perjudian online tidak boleh hanya bersifat episodik, tetapi harus menjadi bagian dari agenda kontinu pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik perjudian ilegal.

Dengan memperhatikan pembelajaran dari kasus-kasus tersebut, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, langkah-langkah preventif dan kerjasama lintas negara juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks dalam menghadapi perjudian online.

KESIMPULAN

Perjudian online telah menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, dengan dampak negatifnya yang meluas terhadap individu dan masyarakat. Dalam upaya menanggulangi perjudian online,

penegakan hukum menjadi salah satu strategi utama yang ditempuh oleh pemerintah dan lembaga terkait. Namun, upaya penegakan hukum ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, termasuk faktor teknologi, regulasi yang belum memadai, dan kurangnya sumber daya manusia dan teknologi.

Melalui analisis kasus-kasus penegakan hukum perjudian online di Indonesia, kita dapat melihat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam mengatasi masalah ini. Kerjasama internasional, tindakan preventif, dan kesinambungan dalam upaya penegakan hukum merupakan beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil dari kasus-kasus tersebut.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, melibatkan kerjasama antarinstansi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan teknologi penegakan hukum. Hanya dengan upaya bersama yang berkelanjutan, kita dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi perjudian online dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif dan aman bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung 2005
- <http://digilib.unimed.ac.id/24706/4/7.%20NIM.%203103122022%20CHAPTER%20I.pdf>, diakses pada tanggal 20 November 2023, pukul 23.55 WIB
- M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Volume, 03, Nomor 1 2016
- Yulianto, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Perjudian Online di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Hukum dan Tata Kelola*, 8(2), 134-147.
- Nasution, A. (2022). Legal Framework and Challenges in Combating Online Gambling in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 20(2), 145-159.
- Setiawan, R. (2023). Digital Forensics Challenges in Investigating Cybercrime: A Case Study of Online Gambling in Indonesia. *Journal of Digital Forensic Science & Technology*, 5(1),

32-45.

Kusuma, A. (2019). Tinjauan Hukum tentang Penegakan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Jentera*, 6(1), 56-69.

Jatiningrum, D. (2020). Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 265-278.